

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zailan, *et.al.*, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo, Jakarta.

Asmarawati, 2014, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Depublish, Yogyakarta.

E. Case, Karl, *et.al.*, 2007, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan*, terjemahan dari *Principles of Economics Eight Edition*, Erlangga, Jakarta.

Efendi, Paulus Lotulung, 1997, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Hermawan, Ari, 2019, *Penyelesaian Sengketa hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta.

Husni, Lalu, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mahkamah Agung, 2005, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Mahmud Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Offset, Yogyakarta.

Kaligis, O.C., 2005, *Mahkamah Konstitusi Praktik & Permasalahannya*, O.C. Kaligis & Associate, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Soejono,*et.al.*, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *et.al.*, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-8, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soepomo, Imam, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Sucahyowati, Hari 2017, *Manajemen Sebuah Pengantar*, Wilis, Jakarta.

Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

Undang- Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 4359).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 5226).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep – 150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan

Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-907/MEN/PHI-PHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Masal.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.643/MEN/PHI-PHI/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Karya Ilmiah

Astika, Made Prama, 2017, “Tinjauan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Efisiensi Yang Didasarkan Pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT “X”, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kirana, Vitriani Nala, 2013, “Pelaksanaan PHK Karena Renovasi (Studi Kasus PHK Hotel Papandayan”, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Juni 2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2017 perihal Kasasi perkara PT Indo Baja Dayatama, 23 Februari 2017.

Jurnal

Eka Bintari, Aninditya, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Pandecta Volume 8 Nomor 1 Januari 2013,

Indrayana Denny, *et.al.*, *Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007.

J. Prang, Amrizal *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XII (April, 2011), pp. 77-94,

Nur Agus Susanto, 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7, No. 3, Desember 2014.

Bahan Internet

Erga Omnes Definition, terjemahan bebas dari “*A erga omnes or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*”, www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx. diakses tanggal 17 Juni 2019.

Ilman Hadi, S.H., Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b2e5da8aa7c/putusan-yang-inkracht>. diakses 26 Juli 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 02 Juli 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, diakses tanggal 25 Juli 2019

Syiti Rommalla, Inilah Unsur-Unsur Hubungan Kerja dalam Perjanjian Kerja, [https:// www.gadjian.com/blog/2018/01/25/inilah-unsur-unsur-hubungan-kerja-dalam-perjanjian-kerja/](https://www.gadjian.com/blog/2018/01/25/inilah-unsur-unsur-hubungan-kerja-dalam-perjanjian-kerja/), diakses tanggal 02 Februari 2019.

Tri Jaya Pramesti, S.H., *Perbedaan Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi/>, diakses tanggal 25 Juli 2019.

Lain

Wulandari Liestiarini, S.H., M.H. dan Tim, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM RI (Tahun 2018), *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*, 12 November 2018.

Narasumber

Evert G Matulesy, Anggota Komite Advokasi, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).